



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM

PERKUMPULAN KELOMPOK TANI

DI REMBANG

PROPOSAL

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi

Progam Studi Hukum Progam Sarjana

Disusun Oleh

Ibnu Maulana Tyas Anggoro

211003742018874

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Diuji Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :
Ibnu Maulana Tyas Anggoro

NPM.211003742018874

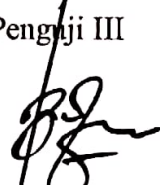
Disahkan Oleh
Dosen Pembimbing/Penguji I

Dr. Sri Purwahingsih, SH., M.Hum
NIDK. 8925690024

Penguji II


Sri Hartati, SH.MHUM
NIDN. 0608076501

Penguji III


Dr. Budi Prasetyo, SH.,MHUM
NIDN. 0612016101

Mengetahui :
Dekan

Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Pembuatan akta badan hukum bagi perkumpulan kelompok tani di Rembang merupakan langkah penting dalam meningkatkan legalitas dan akses kelompok tani terhadap program pemerintah, bantuan keuangan, serta perlindungan hukum dalam kegiatan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan akta badan hukum perkumpulan kelompok tani, termasuk tantangan yang dihadapi serta dampaknya terhadap kelompok tani. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif, mengumpulkan data dari wawancara dengan kelompok tani dan notaris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan akta badan hukum melibatkan tahapan administratif yang kompleks, termasuk penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pengumpulan dokumen administratif, serta pengesahan oleh notaris dan instansi terkait. Kendala utama yang dihadapi meliputi biaya pembuatan akta, kurangnya pemahaman hukum, serta proses birokrasi yang panjang. Namun, legalitas ini memberikan manfaat signifikan, seperti kemudahan dalam mengakses bantuan pemerintah, peningkatan kredibilitas kelompok, serta perlindungan hukum dalam transaksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lebih lanjut dari pemerintah dan pihak akademisi untuk mempercepat serta menyederhanakan proses legalisasi kelompok tani.

Kata Kunci : Badan hukum, perkumpulan kelompok tani, akta notaris

ABSTRACT

The establishment of a legal entity deed for farmer groups in Rembang is a crucial step in enhancing their legality and access to government programs, financial assistance, and legal protection in agricultural activities. This study aims to analyze the process of creating a legal entity deed for farmer groups, including the challenges encountered and its impact on these groups. The research employs a socio-legal approach with a qualitative descriptive method, collecting data through interviews with farmer groups and relevant notaries. The findings reveal that the process involves complex administrative stages, including drafting the Articles of Association and Bylaws (AD/ART), gathering administrative documents, and obtaining approval from notaries and relevant authorities. The primary challenges faced include the cost of deed issuance, limited legal understanding, and lengthy bureaucratic procedures. However, obtaining legal status provides significant benefits, such as easier access to government assistance, increased group credibility, and legal protection in agricultural transactions. Therefore, further support from the government and academics is needed to accelerate and simplify the legalization process for farmer groups.

Keywords: Legal entity, farmer group association, notarial deed

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PESEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	12
b. Akta.....	14
c. Badan Hukum.....	22
d. Perkumpulan	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	37
A. Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani di Rembang.....	37
B. Pelaksanaan Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani di Rembang.....	50
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar nama Kelompok Tani.....	39
--	----